



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 24/KEP-BKIPM/2019**

TENTANG

**PEDOMAN INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
DI INSTALASI KARANTINA UNTUK IKAN MATI PADA KEGIATAN IMPORTASI
KOMODITAS PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa untuk menilai instalasi karantina untuk ikan mati dalam menerapkan cara karantina ikan yang baik pada kegiatan importasi komoditas perikanan dalam rangka mencegah dan tersebarnya penyakit ikan berbahaya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Pedoman Inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi Karantina Untuk Ikan Mati pada Kegiatan Importasi Komoditas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.03/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan oleh Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan dan Media Pembawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PEDOMAN INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI INSTALASI KARANTINA UNTUK IKAN MATI PADA KEGIATAN IMPORTASI KOMODITAS PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina untuk Ikan Mati pada Kegiatan Importasi Komoditas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh Inspektur Karantina Ikan di tingkat Pusat maupun UPT KIPM mengacu kepada Pedoman Inspeksi CKIB di Instalasi Karantina untuk Ikan Mati pada Kegiatan Importasi Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatan inspeksi CKIB di instalasi karantina untuk ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan.
- KETIGA : Kepala UPT lingkup BKIPM untuk melakukan pengawasan pelaksanaan inspeksi CKIB di instalasi karantina untuk ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan milik perorangan atau badan hukum di lingkup wilayah kerjanya.
- KEEMPAT : Kepala Pusat Karantina Ikan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Inspektur Karantina di lingkup BKIPM, dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi CKIB pada instalasi karantina untuk ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan milik kementerian, perorangan atau badan hukum.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 369/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Penerapan Cara Karantina Ikan Yang Baik di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Mati dan Benda Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Kerja Sama, dan Humas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
NOMOR 24/KEP-BKIPM/2019
TENTANG
PEDOMAN INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN
YANG BAIK DI INSTALASI KARANTINA UNTUK
IKAN MATI PADA KEGIATAN IMPORTASI
KOMODITAS PERIKANAN

PEDOMAN INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
DI INSTALASI KARANTINA UNTUK IKAN MATI
PADA KEGIATAN IMPORTASI KOMODITAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Importasi komoditas perikanan selain memberikan dampak positif terhadap perolehan devisa dan pembangunan perekonomian negara, disisi lain disadari atau tidak perdagangan antar negara juga memiliki risiko terhadap berpindahnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)/Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu melalui komoditas yang diperdagangkan. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), sebagai benteng terakhir pada kegiatan importasi komoditas perikanan perlu bertindak secara hati-hati dalam pelaksanaan pengamanan sumberdaya hayati dengan memperhitungkan setiap resiko yang dapat terjadi agar keamanan sumber daya hayati negara ini senantiasa terjaga.

Berkaitan dengan adanya risiko tersebut, banyak negara telah memberlakukan persyaratan atau ketentuan importasi yang ketat agar setiap komoditas perikanan bebas dari terintroduksinya HPIK/HPI tertentu yang tidak dikehendaki. Kesehatan ikan dan keamanan hasil perikanan saat ini telah menjadi isu dan kebijakan perdagangan internasional, oleh

karena itu tindakan karantina pada kegiatan importasi komoditas perikanan menjadi sangat penting guna memastikan bahwa komoditas tersebut bebas dari berbagai penyakit ikan berbahaya dan memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Salah satu fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina pada importasi komoditas perikanan adalah instalasi karantina ikan. Berkaitan dengan HPIK/HPI tertentu yang berpotensi terbawa bersama-sama komoditas perikanan yang akan diimpor, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan menekankan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK/HPI tertentu serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). CKIB merupakan pendekatan sistem yang ditetapkan BKIPM untuk mengelola seluruh instalasi karantina milik perseorangan atau badan hukum yang telah ditetapkan, agar setiap tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dapat dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran.

Untuk dapat menjalankan manajemen kesehatan ikan di instalasi karantina yang efektif, setiap pemilik/penanggung jawab instalasi wajib menyusun suatu acuan kerja yang terencana, tersusun dan mampu ditelusuri yang tertuang dalam dokumen mutu CKIB. Dokumen mutu CKIB sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 62/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu CKIB memuat organisasi, alur proses produksi, identifikasi bahaya disetiap proses produksi, standar operasional prosedur (SOP) dan instruksi kerja (IK) dalam setiap tahapan kegiatan.

Keberhasilan manajemen kesehatan di suatu unit instalasi karantina tidak luput dari konsistensi pemilik/penanggungjawab instalasi karantina dalam menerapkan dan mengimplementasikan dokumen mutu, kelayakan teknis dan kesesuaian peruntukan instalasi karantina. Melalui implementasi CKIB, diharapkan instalasi karantina, khususnya untuk ikan mati mampu menjadi filter masuknya penyakit ikan berbahaya dan komoditas perikanan yang tidak sesuai standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Memperhatikan beberapa hal diatas, dalam rangka menegakkan fungsi pengendalian masuknya komoditas perikanan impor, serta guna memastikan bahwa instalasi karantina untuk ikan mati pada kegiatan impor telah dikelola dengan baik, salah satu upaya kontrol yang dilakukan BKIPM sebagai Otoritas Kompeten adalah melalui kegiatan inspeksi. Kegiatan inspeksi instalasi karantina merupakan suatu proses pemeriksaan/audit dengan cara mengukur, menilai, mencatat, mengumpulkan, menganalisa dan mengkomunikasikan setiap data dan informasi serta tindakan yang dilaksanakan di instalasi karantina, telah sesuai dengan dokumen mutu CKIB.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan inspeksi CKIB di instalasi karantina untuk ikan mati dapat dilakukan lebih efektif dan didapatkan hasil maksimal, keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 369/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Penerapan CKIB di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan/Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Mati dan Benda Lain, perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan.

B. Tujuan

Tujuan dari revisi Pedoman Inspeksi CKIB di Instalasi Karantina Ikan untuk ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan ini adalah untuk:

1. Menyempurnakan pedoman yang telah disusun sebelumnya, sehingga diperoleh pedoman inspeksi yang lebih efektif, mudah dipahami dan diterapkan serta selaras dengan kebijakan BKIPM.
2. Mengatur kembali tata cara atau pelaksanaan kegiatan inspeksi sesuai prinsip-prinsip inspeksi pada suatu sistem secara umum.
3. Memperbaiki *checklist* (kuesioner) inspeksi melalui penambahan beberapa kriteria dan sistem pembobotan sehingga diharapkan diperoleh hasil inspeksi yang lebih akurat dan akuntabel.
4. Penyesuaian waktu layanan terkait tindak lanjut kegiatan inspeksi dan jangka waktu pengenaan sanksi ketidakpatuhan terhadap hasil inspeksi sesuai revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang Instalasi Karantina Ikan.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Inspeksi CKIB di Instalasi Karantina Ikan untuk ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan ini adalah tersedianya pedoman yang mudah dipahami dan diterapkan sehingga dapat dijadikan acuan bagi:

1. Inspektur Karantina Ikan lingkup Badan dan UPT KIPM dalam melaksanakan kegiatan Inspeksi CKIB di Instalasi Karantina untuk Ikan Mati milik perorangan/badan hukum;
2. Pengelola aplikasi CKIB *online* dalam melakukan *update system*.

D. Istilah dan Definisi

1. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan.
2. Instalasi Karantina Milik Perorangan/Badan Hukum adalah instalasi karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah ditetapkan dalam bentuk Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, yang pengelolaannya dibawah pengawasan UPT KIPM.
3. Cara Karantina Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan ikan.
4. Inspeksi Penerapan CKIB adalah proses pemeriksaan yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti dan mengevaluasinya secara obyektif penerapan CKIB di instalasi karantina.
5. Evaluasi Hasil Inspeksi CKIB adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pusat untuk menentukan hasil akhir kegiatan inspeksi CKIB sebagai dasar penerbitan rekomendasi (penolakan/penerbitan Sertifikat CKIB).
6. Temuan adalah pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama inspeksi dan didukung dengan bukti-bukti obyektif.
7. Audit Internal adalah audit yang dilakukan secara internal oleh organisasi (Manajemen instalasi karantina) itu sendiri untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar atau sistem mutu

- organisasi sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan.
8. Dokumen Mutu Karantina Ikan adalah sekumpulan dokumen yang berisi tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau instruksi kerja serta formulir kegiatan/rekaman data suatu Instalasi Karantina UUPI dalam menerapkan CKIB berdasarkan prinsip biosecurity untuk menjamin kesehatan ikan.
 9. Pemilik Instalasi adalah perorangan/badan hukum yang memiliki, menguasai dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan instalasi karantina yang namanya tercantum di dalam Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
 10. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
 11. Hama Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang sudah terdapat dan/atau belum terdapat di wilayah Republik Indonesia yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian ikan.
 12. *Biosecurity* adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan.
 13. Ketertelusuran atau *traceability* adalah suatu keadaan/kemampuan untuk menelusuri keseluruhan proses produksi dan biosecurity berdasarkan rekaman data.
 14. Standar adalah spesifikasi teknis sesuatu hal yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
 15. Personil/petugas adalah karyawan yang ditunjuk perusahaan dan telah tersertifikasi CKIB untuk mengemban wewenang, dan tanggung jawab mulai dari tahap perencanaan dan konsisten penerapan CKIB.

16. Inspektur Karantina Ikan adalah pegawai negeri tertentu yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan inspeksi dan pengambilan contoh uji apabila dipandang perludalam rangka penerapan CKIB, yang telah ditetapkan dan mendapatkan nomor registrasi sebagai inspektur karantina ikan dengan Surat Keputusan Kepala BKIPM.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT KIPM adalah unit kerja teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan KIPM.
18. Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Kepala Badan KIPM adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina Ikan, pengendalian mutu, dan keamanan Hasil Perikanan.
19. Kepala Pusat Karantina Ikan yang selanjutnya disebut dengan Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.
20. Tim Pusat adalah inspektur karantina yang berkedudukan di Pusat Karantina Ikan dan memiliki tugas menginspeksi instalasi karantina dan mengevaluasi laporan hasil penilaian kelayakan instalasi dan inspeksi CKIB.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Pedoman Inspeksi Penerapan CKIB di Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Mati adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina oleh Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa;
8. Keputusan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 110/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik;
9. Keputusan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 319/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP INSPEKSI, KATEGORISASI KETIDAKSESUAIAN,
DAN KLASIFIKASI INSTALASI KARANTINA IKAN

A. Prinsip - Prinsip Inspeksi

Prinsip-prinsip pada pelaksanaan inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi karantina untuk Ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan inspeksi harus mengikuti tata cara dan jadwal yang ditetapkan, untuk kepentingan dan tujuan tertentu, inspeksi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan.
2. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan secara independen, berbasis bukti (*evidence-based*), secara kooperatif dan etis serta profesional, dengan menghormati kerahasiaan informasi sebagaimana mestinya, yaitu:
 - a. Inspektur Karantina Ikan harus mampu menunjukkan bahwa temuan, kesimpulan dan rekomendasi dari inspeksi didasari oleh bukti yang obyektif;
 - b. Perilaku profesional ditunjukkan oleh kedua belah pihak selama proses inspeksi;
 - c. Inspektur Karantina Ikan harus bebas dari konflik kepentingan;
 - d. Prinsip kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan inspeksi harus dipatuhi;
 - e. Apabila ada permintaan informasi berupa dokumentasi gambar/foto, harus melalui persetujuan dari manajemen atau penanggungjawab instalasi karantina, karena berkaitan dengan masalah kerahasiaan.
3. Para pihak harus memiliki prosedur atau tata cara yang telah disepakati untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses inspeksi. Semua isu yang berkembang harus didiskusikan antara kedua belah pihak dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati.
4. Inspeksi harus dilakukan berbasis sistem (*systems-based*), dengan penilaian meliputi:
 - a. Catatan kepatuhan (*compliance records*) instalasi karantina;
 - b. Pengendalian penerapan CKIB oleh manajemen instalasi karantina;
 - c. Ketentuan peraturan dan program yang berlaku;

- d. Pemenuhan instalasi karantina terhadap persyaratan yang ditetapkan, terutama terkait sistem/alur produksi, penerapan biosekuriti, ketertelusuran data dan pengarsipan (*record keeping*);
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Kompetensi personil instalasi karantina; dan
 - g. Kemampuan dan kelayakan/validitas hasil uji laboratorium bagi instalasi karantina yang memiliki laboratorium.
5. Proses inspeksi harus transparan, konsisten dan terdokumentasi.
- a. Proses inspeksi yang transparan dan konsisten dapat tercapai dengan adanya dokumentasi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak;
 - b. Dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan inspeksi, diperlukan komunikasi yang intensif dan transparan antara Inspektur Karantina Ikan dan pihak Manajemen Instalasi Karantina pada semua tahapan, mulai dari pembahasan rencana inspeksi sampai dengan pelaporan akhir dan apabila diperlukan, penyelesaian terhadap temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi;
 - c. Proses dan tata cara dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi inspeksi harus didokumentasikan dan disetujui sebelum atau pada saat inspeksi dilakukan;
 - d. Inspektur Karantina yang ditugaskan melakukan inspeksi harus memberitahu sebelumnya mengenai hal-hal yang mungkin muncul selama kunjungan;
 - e. Inspeksi harus menggunakan kriteria penilaian yang jelas (sesuai pedoman).

B. Kategori Ketidaksesuaian Inspeksi CKIB

Dalam rangka inspeksi CKIB di instalasi karantina perlu ditetapkan kriteria-kriteria dan parameter penilaian. Penentuan kriteria dan parameter penilaian inspeksi CKIB didasarkan pada ringan atau beratnya objek tersebut terhadap peluang penyebaran HPIK/HPI tertentu disetiap tahapan kegiatan/proses produksi. Temuan inspeksi berupa ketidaksesuaian (*non-compliance*) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Kritis

Suatu ketidaksesuaian dikategorikan kritis, apabila:

- a. Gagal dalam memenuhi persyaratan akan mengakibatkan:
 - 1) Muncul dan tersebarnya HPIK/HPI tertentu, dan/atau
 - 2) Sistem pengelolaan CKIB tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Terdapat penyimpangan/penyalahgunaan terhadap status kepemilikan/pengelolaan instalasi.
2. **Serius**
- Suatu ketidaksesuaian dikategorikan serius, apabila gagal dalam memenuhi persyaratan atau pelaksanaan proses sehingga mengakibatkan komoditas berpeluang besar menyebarkan HPIK/HPI tertentu dan/atau terhambatnya sistem CKIB.
3. **Mayor**
- Suatu ketidaksesuaian dikategorikan mayor, apabila gagal dalam memenuhi persyaratan atau pelaksanaan proses sehingga mengakibatkan komoditas masih berpeluang menyebarkan HPIK/HPI tertentu.
4. **Minor**
- Suatu ketidaksesuaian dikategorikan minor, apabila gagal dalam memenuhi persyaratan ataupun pelaksanaan proses tersebut tidak berakibat langsung dalam penyebaran HPIK/HPI tertentu (kemungkinan kecil).

C. *Scoring/Grading*

Penentuan kesesuaian hasil inspeksi instalasi karantina didasarkan pada *scoring* dan *grading* yang meliputi seluruh kriteria/unsur penilaian (persyaratan utama, persyaratan manajemen dan persyaratan teknis). *Scoring* dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai berdasarkan hasil temuan ketidaksesuaian kategori kritis, serius, mayor, dan minor.

Tabel 1. *Kriteria Scoring/Grading* Hasil Inspeksi CKIB

NO.	INTERVAL NILAI (SCORE)	KATEGORI (KELAS)
1.	91 - 100	A
2.	71 - <91	B
3.	56 - <71	C

Berdasarkan *checklist* Inspeksi CKIB pada instalasi karantina Ikan Mati sebagaimana formulir 4 dan temuan inspeksi sebagaimana formulir

5, maka jumlah parameter berdasarkan masing-masing kategorinya adalah sebagaimana tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah Parameter Tiap Kategori

NO.	KATEGORI	JUMLAH PARAMETER
1.	Minor	5
2.	Mayor	12
3.	Serius	17
4.	Kritis	18

D. Penghitungan Nilai

Penentuan nilai pada inspeksi CKIB di instalasi karantina ikan mati menggunakan cara penghitungan sebagai berikut:

1. Jumlahkan seluruh hasil temuan ketidaksesuaian pada setiap kategori serius, mayor dan minor;
2. Bagi hasil temuan tersebut dengan jumlah seluruh unsur pada masing-masing kategori;
3. Kalikan jumlah nilai yang didapat pada masing-masing kategori berdasarkan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. Kategori minor dikalikan 5 = A
 - b. Kategori mayor dikalikan 25 = B
 - c. Kategori serius dikalikan 70 = C
 - d. Tambahkan seluruh penilaian: $A+B+C = D$;
 - e. Hasil penilaian akhir (E) adalah diperoleh dengan menggunakan rumus:
 $E = 100 - (A+B+C)$ atau $E = 100 - D$
 - f. Bandingkan kisaran nilai E dengan nilai pada tabel 1;
 - g. Didapatkan kategori (grade) instalasi karantina ikan untuk ikan mati berdasarkan hasil inspeksi.

E. Pengecualian

1. Apabila berdasarkan hasil inspeksi terdapat temuan kategori kritis maka dapat langsung dinyatakan tidak lulus dengan tidak mempergunakan rumus tersebut;
2. Apabila terdapat sub unsur di dalam kuesioner/*checklist* yang tidak relevan pada saat inspeksi instalasi karantina yang disebabkan oleh jenis media pembawa yang mempunyai karakteristik khusus atau status kegiatan hanya sebagai penampung sementara, maka terhadap

kriteria penilaian yang tidak relevan tersebut dapat diabaikan atau tidak dijadikan sebagai temuan.

F. Contoh Penghitungan

Apabila dalam suatu inspeksi CKIB pada instalasi karantina ikan mati diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Temuan kategori kritis = 0
- b. Temuan kategori serius = 3 (dengan jumlah unsur 17)
- c. Temuan kategori mayor = 4 (dengan jumlah unsur 12)
- d. Temuan kategori minor = 1 (dengan jumlah unsur 5)

Maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kategori minor $1/5 \times 5 = 1$ (A)
- Kategori mayor $4/12 \times 25 = 8.33$ (B)
- Kategori serius $3/17 \times 70 = 12.36$ (C)

Hasil Penilaian Akhir (score)= E

$$E = 100 - (1 + 8.33 + 12.36) = 78.31$$

Nilai akhir yang diperoleh, yaitu 78.31 dibandingkan dengan Kriteria *Scoring/Grading* Hasil Inspeksi CKIB sesuai tabel 1. Berdasarkan kisaran nilai tersebut, instalasi karantina diklasifikasikan Kelas B.

Berdasarkan temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi CKIB, suatu instalasi dikategorikan sebagai berikut:

1. Tidak Lulus Inspeksi
 - a. instalasi karantina dinyatakan tidak lulus apabila terdapat temuan ketidaksesuaian dengan kategori kritis; atau
 - b. instalasi karantina dinyatakan tidak lulus apabila hasil inspeksi didapatkan total penilaian kurang dari 56.

2. Lulus Inspeksi

Instalasi karantina dapat dinyatakan lulus apabila berdasarkan hasil penilaian tidak terdapat temuan ketidaksesuaian kategori kritis. Instalasi Karantina yang dinyatakan lulus CKIB dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:

- a. Kelas A (Sangat baik), apabila:
Hasil penilaian 91-100.
- b. Kelas B (baik), apabila:
Hasil penilaian 71 - <91.

- c. Kelas C (cukup), apabila:
Hasil penilaian 56 - <71.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
INSPEKSI CKIB

A. Persyaratan

1. Ketentuan Pelaksanaan Inspeksi

Inspeksi di instalasi karantina untuk ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk melihat konsistensi penerapan CKIB; dan/atau
- b. selama masa karantina, untuk memastikan bahwa komoditas perikanan impor:
 - 1) tidak dipindahtempatkan dari instalasi karantina Ikan ke tempat lain;
 - 2) tidak dipindahtangankan dari pemilik Hasil Perikanan kepada pihak lain; dan/atau
 - 3) tidak ditukar dengan Hasil Perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.

2. Inspeksi penerapan CKIB pada Kondisi tertentu

Kegiatan inspeksi dapat dilakukan untuk kondisi sebagai berikut:

- a. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil verifikasi dan penilaian kelayakan instalasi karantina;
- b. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil inspeksi CKIB;
- c. ditemukan positif HPIK/HPI tertentu atau terjadi kematian massal;
- d. adanya kegiatan inspeksi dari Negara tujuan;
- e. adanya indikasi ketidaktaatan penerapan CKIB; atau
- f. dalam rangka verifikasi terkait pemberian atau pencabutan sanksi administrasi.

3. Pelaksana Inspeksi

Inspeksi dilaksanakan oleh inspektur karantina ikan yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Instalasi karantina Milik Kementerian.

Pelaksana Inspeksi adalah Inspektur Karantina Ikan lingkup Pusat yang telah memiliki nomor registrasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan KIPM.

b. Instalasi karantina Milik Perorangan/ Badan Hukum.

Pelaksana Inspeksi adalah Inspektur Karantina Ikan di UPT KIPM dan/atau Inspektur Karantina Ikan lingkup Pusat yang telah memiliki nomor registrasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan KIPM.

4. Tim Inspeksi Penerapan CKIB

Tim Inspeksi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota tim dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

a. Ketua Tim

Bertanggungjawab atas seluruh tahapan inspeksi dan memiliki kemampuan, pengalaman manajemen, serta mempunyai wewenang untuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan inspeksi di instalasi karantina secara efektif dan efisien;
- 2) Menjamin kerahasiaan dokumen;
- 3) Membuat keputusan akhir berkenaan dengan pelaksanaan inspeksi;
- 4) Membuat laporan hasil inspeksi dan verifikasi tindakan perbaikan inspeksi;
- 5) Mengesahkan dan melaporkan kegiatan inspeksi.

b. Anggota Tim

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan inspeksi secara efektif dan efisien;
- 2) mendokumentasikan seluruh hasil kegiatan inspeksi;
- 3) memberikan masukan dan rekomendasi temuan ketidaksesuaian;
- 4) mengarsipkan dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan inspeksi;
- 5) menjamin kerahasiaan dokumen.

B. Kesekretariatan CKIB

Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan KIPM yang mendapat tugas pendelegasian kegiatan inspeksi, guna meningkatkan pelaksanaan Inspeksi dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka UPT KIPM dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai

ISO:17020. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat penting untuk membentuk sekretariat IKI/CKIB.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan inspeksi, kesekretariatan CKIB bertugas:

1. Menyusun rencana kerja inspeksi
 - a. Melakukan verifikasi terhadap seluruh stakeholder yang harus diinspeksi (baru/perpanjangan);
 - b. Menyusun rencana bulanan kegiatan inspeksi CKIB;
 - c. Menyusun rencana tahunan kegiatan inspeksi CKIB.
2. Pengajuan Tim inspeksi

Berdasarkan rencana kerja inspeksi, kesekretariatan mengajukan Inspektur Karantina Ikan yang ditugaskan melakukan kegiatan inspeksi secara *online* pada <http://ckib.bkipm.kkp.go.id> sesuai formulir 1.
3. Verifikasi dan Pelaporan

Kesekretariatan CKIB melakukan verifikasi terhadap hasil inspeksi dan/atau tindakan perbaikan temuan hasil inspeksi, sebagai dasar penyusunan laporan ke Pusat Karantina Ikan oleh kepala UPT KIPM.
4. Pengarsipan Dokumen Inspeksi CKIB

Selain menjalankan tugas-tugas di atas, Kesekretariatan CKIB juga memiliki tanggung jawab dalam pengarsipan seluruh dokumen terkait kegiatan inspeksi CKIB (surat tugas inspeksi, temuan dan hasil inspeksi, tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian inspeksi, hasil surveilan HPIK/HPI tertentu, dokumentasi Sertifikat IKI dan CKIB, dokumen pelaporan dst).

C. Persiapan Pelaksanaan Inspeksi

Inspektur Karantina dalam melakukan tugas inspeksi, perlu mempersiapkan:

1. Surat perintah tugas inspeksi CKIB sebagaimana tercantum dalam formulir 2;
2. Rencana kegiatan inspeksi CKIB (menentukan waktu, komunikasi dengan penanggung jawab instalasi, pembagian tugas, uraian kegiatan, dokumentasi dan pelaporan);
3. Kelengkapan dokumen meliputi :

- a. Form Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Inspeksi sesuai formulir 3;
 - b. *Checklist* Inspeksi penerapan CKIB pada IKI untuk Ikan Mati sesuai formulir 4;
 - c. Form Daftar Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi sesuai formulir 5.
4. Mempelajari dokumen mutu, hasil monitoring dan surveilan HPIK/HPI tertentu serta hasil inspeksi sebelumnya (jika ada) untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan CKIB;
 5. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan inspeksi.

D. Pelaksanaan Inspeksi

Inspeksi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu *desk assessment* verifikasi, yang dilakukan untuk menilai kesesuaian dokumen mutu dengan rekaman/ informasi tertulis, dan *on-site verification/* verifikasi lapangan yang dilakukan untuk melihat kesesuaian prosedur dalam dokumen mutu dengan mengamati secara langsung pelaksanaannya di lapangan. Tahapan pelaksanaan Inspeksi meliputi:

1. Pertemuan pembukaan

Ketua tim memimpin pertemuan pembukaan inspeksi yang dihadiri oleh anggota tim dan manajemen instalasi, hal ini dimaksudkan untuk:

- a. Menjelaskan pelaksanaan inspeksi secara ringkas, termasuk metode inspeksi, kriteria penilaian, dan sarana prasarana (fasilitas) inspeksi yang digunakan;
- b. Memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan inspeksi;
- c. Melakukan diskusi dalam rangka untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari pihak manajemen instalasi tentang pelaksanaan CKIB.

Pada saat pelaksanaan pertemuan pembukaan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyerahan surat tugas inspeksi kepada manajemen instalasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan inspeksi;
- b. Perkenalan tim inspeksi termasuk tugas masing-masing, kepada pihak manajemen;

- c. Pengisian daftar hadir, diisi oleh seluruh peserta yang terlibat di dalam kegiatan inspeksi baik tim inspeksi maupun manajemen;
- d. Menginformasikan metode dan prosedur yang dipakai dalam pelaksanaan inspeksi kepada pihak manajemen bahwa bukti/temuan inspeksi ditentukan berdasarkan sampel (uji petik) dan informasi yang diperoleh;
- e. Konfirmasi pihak yang bertanggung jawab langsung terkait dengan tujuan dan ruang lingkup inspeksi;
- f. Konfirmasi ketersediaan, peran dan identitas pendamping peninjauan lapangan dan ruangan khusus untuk bekerja;
- g. Konfirmasi terhadap ketersediaan dokumen, rekaman data dan fasilitas yang diperlukan terkait kegiatan inspeksi;
- h. Konfirmasi bahwa tim inspeksi diijinkan mengambil dokumentasi sebagai bukti hasil inspeksi/temuan;
- i. Informasi tentang kondisi jika inspeksi harus dihentikan; dan
- j. Informasi tentang sistem/tata cara pelaporan tindakan perbaikan, apabila didapati temuan ketidaksesuaian.

2. Tinjauan Dokumen (*Document Review*)

Tinjauan dokumen dilakukan dalam rangka verifikasi kesesuaian bukti fisik pada saat *desk assessment* dengan dokumen-dokumen terkait penerapan CKIB di instalasi karantina. Tim inspeksi melakukan verifikasi, yang meliputi:

- a. Konfirmasi standar operasional prosedur yang tertuang dalam dokumen mutu dengan pelaksanaan di masing-masing unit;
- b. Konfirmasi instruksi kerja dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Pengisian rekaman data yang dilakukan oleh masing-masing unit;
- d. Konfirmasi kebenaran isi rekaman data;
- e. Konfirmasi hasil survailan HPIK/HPI tertentu oleh UPT KIPM yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji (LHU) laboratorium.

3. Pemeriksaan Lapangan

Tahapan inspeksi ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti objektif di lapangan. Pengumpulan bahan bukti tersebut dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, antara lain:

- a. Pengamatan (observasi) terhadap kondisi kerja, lingkungan dan kegiatan operasional pengendalian kesehatan ikan serta penerapan

biosecurity dalam setiap tahapan di instalasi karantina dan laboratorium diagnosis penyakit ikan (apabila memiliki);

- b. Wawancara dengan para karyawan/pegawai dan pihak terkait lainnya;
 - c. Pemeriksaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja, ketelusuran (*traceability*) terhadap rekaman data;
 - d. Pengisian *checklist* (daftar pertanyaan atau daftar hal-hal yang perlu diperiksa untuk panduan bagi tim inspeksi dalam bertanya atau melakukan inspeksi). *Checklist* inspeksi dapat dilihat pada formulir 4; dan
 - e. Pengambilan contoh uji (apabila dipandang perlu)
Pengambilan contoh uji mengikuti Petunjuk Teknis Monitoring Penerapan CKIB dan Surveilans HPI/HPIK.
4. Perumusan Temuan Sementara Hasil Inspeksi

Sebelum melakukan pertemuan penutupan (*closing meeting*) Tim Inspeksi membuat hasil temuan sementara kegiatan inspeksi. Temuan sementara dibuat berdasarkan pada bukti-bukti obyektif yang diperoleh selama pelaksanaan inspeksi (peninjauan dokumen dan pemeriksaan lapangan untuk masing-masing kriteria penilaian).

Hasil sementara inspeksi disusun berdasarkan capaian positif yang telah dilaksanakan dan temuan negatif. Capaian positif yaitu apabila berdasarkan bukti inspeksi terdapat hal-hal yang bersifat positif dan perlu dikemukakan sebagai penghargaan atau apresiasi, sedangkan temuan negatif berupa poin-poin kegiatan, situasi lingkungan, dokumen serta praktik kerja yang kurang sesuai dengan acuan (pedoman, persyaratan, dokumen mutu dan sebagainya) yang ditetapkan.

Tim dapat melakukan klarifikasi penyebab adanya temuan ketidaksesuaian kepada manajemen instalasi karantina apabila diperlukan. Adapun temuan final inspeksi akan disampaikan secara lengkap pada laporan akhir inspeksi. Kesimpulan sementara inspeksi berisi gambaran secara umum penerapan CKIB di instalasi karantina untuk ikan mati sesuai dokumen mutu dan pedoman CKIB yang ditetapkan.

5. Pertemuan Penutup

Pada akhir kegiatan inspeksi dilakukan pertemuan penutup dengan tujuan antara lain:

- a. Menyampaikan temuan dan kesimpulan sementara hasil inspeksi secara garis besar;
- b. Sebagai forum untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan atau kekhawatirannya terkait hasil inspeksi bagi pihak manajemen instalasi karantina; dan
- c. Menyampaikan waktu kesepakatan tindak lanjut temuan ketidaksesuaian kepada manajemen instalasi karantina.

Beberapa hal yang perlu disampaikan saat pertemuan penutup, diantaranya:

- a. Ucapan terima kasih atas kerjasama dari manajemen instalasi karantina;
- b. Penyampaian temuan ketidaksesuaian sementara atas inspeksi penerapan CKIB yang dilakukan;
- c. Memberikan kesempatan kepada manajemen instalasi karantina untuk mengklarifikasi atau memberikan tanggapan atas hasil temuan ketidaksesuaian;
- d. Penyampaian prosedur dan masa waktu tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian;
- e. Kesepakatan rencana dan tanggal pelaksanaan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian;
- f. Penandatanganan form temuan ketidaksesuaian inspeksi CKIB oleh ketua tim inspeksi dan pihak manajemen instalasi; dan
- g. Penandatanganan form daftar hadir penutupan.

BAB IV TINDAKAN PERBAIKAN DAN PELAPORAN

A. Tindakan Perbaikan

Instalasi karantina untuk ikan mati yang sudah di inspeksi dan ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan CKIB-nya, wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan kesanggupan perbaikan dan tenggat waktu penyelesaian ketidaksesuaian yang tertera di dalam Daftar Temuan Ketidaksesuaian yang sudah ditandatangani antara Ketua Tim Inspeksi dan pimpinan/penanggungjawab instalasi. Adapun mekanisme perbaikannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/penanggung jawab instalasi karantina menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai format Surat Pengantar Laporan Tindakan Perbaikan Temuan Inspeksi CKIB dengan berkas pendukung lainnya yang ditujukan kepada Kepala UPT KIPM setempat (formulir 7);
2. Perbaikan yang dilakukan oleh pihak instalasi, baik yang bersifat fisik maupun dokumen administrasi mengikuti format Laporan Tindakan Perbaikan sebagaimana formulir 8;
3. Kepala UPT KIPM menugaskan Inspektur Karantina yang melaksanakan inspeksi CKIB untuk melakukan verifikasi tindakan perbaikan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan tindakan perbaikan dari manajemen instalasi karantina.
4. Apabila tindakan perbaikan telah sesuai dengan temuan ketidaksesuaian, Inspektur Karantina UPT KIPM setempat/Inspektur Karantina Ikan Pusat membuat dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Tindakan Perbaikan Inspeksi (formulir 9).
5. Apabila tindakan perbaikan tidak sesuai dengan temuan ketidaksesuaian, maka inspektur Inspektur Karantina UPT KIPM setempat/Inspektur Karantina Ikan Pusat menyampaikan kepada pimpinan/penanggungjawab instalasi karantina untuk melakukan perbaikan lebih lanjut sesuai hasil verifikasi/Berita Acara Verifikasi Tindakan Perbaikan Inspeksi (formulir 9).
6. Apabila tindakan perbaikan telah sesuai dengan temuan ketidaksesuaian, Kepala UPT KIPM/ Tim Pusat menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi CKIB kepada Kepala Pusat sesuai form pada formulir 10, dengan melampirkan Laporan Tindakan Perbaikan

- Temuan Inspeksi (formulir 8) dan Berita Acara Verifikasi Tindakan Perbaikan Inspeksi (formulir 9).
7. Kepala Pusat melalui bidang yang membidangi instalasi karantina ikan menugaskan Tim Evaluasi Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Inspeksi CKIB UPT KIPM.
 8. Tim Evaluasi Pusat Karantina Ikan segera melakukan kegiatan evaluasi terhadap Laporan Hasil Inspeksi CKIB UPT KIPM dengan output:
 - a. Apabila Laporan Hasil Inspeksi CKIB UPT KIPM dinyatakan tidak disetujui/persyaratan tidak atau belum terpenuhi, maka Tim Evaluasi Pusat merekomendasikan untuk tidak diterbitkan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB);
 - b. Apabila Laporan Hasil Inspeksi CKIB UPT KIPM dinyatakan disetujui/persyaratan telah terpenuhi, maka Tim Pusat merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB).
 9. Untuk Rekomendasi Hasil Inspeksi CKIB yang tidak disetujui/persyaratan tidak atau belum terpenuhi, Petugas Administrasi Puskari menerbitkan surat penolakan, dengan disertai alasan.
 10. Untuk Rekomendasi Hasil Inspeksi CKIB yang disetujui/persyaratan telah terpenuhi, Petugas Administrasi Puskari menerbitkan Sertifikat CKIB secara *online* untuk ditandatangani oleh Kepala Badan KIPM/Pusat Karantina Ikan.
 11. Pemilik instalasi karantina yang tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan hasil inspeksi CKIB diberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian (rekomendasi tindakan perbaikan).
 - b. Pembekuan Sertifikat IKI, apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah peringatan tertulis, pemilik instalasi tidak juga melaksanakan tindakan perbaikan temuan inspeksi.
 - c. Pencabutan Sertifikat IKI, apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja, pemilik instalasi tetap tidak melakukan perbaikan temuan inspeksi.

12. Kepala Pusat Karantina Ikan atau Kepala UPT KIPM dapat memberikan perpanjangan waktu tindakan perbaikan di instalasi karantina apabila:
 - a. Pemilik/pengelola instalasi tidak mampu menyelesaikan perbaikan sesuai dengan waktu yang disepakati;
 - b. Tindakan perbaikan belum sesuai dengan rekomendasi perbaikan.Format Surat Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi sebagaimana formulir 11 (sebelas).
13. Apabila dalam masa waktu perpanjangan perbaikan pemilik/pengelola instalasi tidak mampu menyelesaikan rekomendasi tindakan perbaikan, ketua tim inspeksi membuat laporan tertulis yang ditujukan ke Kepala Pusat Karantina Ikan atau Kepala UPT KIPM dengan rekomendasi pencabutan instalasi karantina.
14. Apabila berdasarkan hasil inspeksi ditemukan bahwa instalasi karantina ikan milik perorangan/badan hukum tidak menerapkan CKIB sesuai ketentuan yang berlaku, maka Tim Inspeksi merekomendasikan pencabutan sertifikat IKI.

B. Pelaporan Kegiatan Inspeksi

Semua kegiatan dalam rangka inspeksi CKIB di instalasi karantina ikan harus direkam dan disusun dalam bentuk laporan tertulis. Tim inspeksi bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyusun laporan inspeksi. Laporan inspeksi harus diberikan secara lengkap, benar, tepat dan jelas. Untuk keperluan pengarsipan, sistematika penulisan laporan secara internal dapat dilihat pada formulir 6 dengan melampirkan: (1) surat tugas inspeksi, (2) daftar hadir pembukaan dan penutupan inspeksi, dan (3) daftar temuan ketidaksesuaian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan inspeksi, yaitu:

1. Laporan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Inspeksi;
2. Melampirkan bukti obyektif yang mendukung suatu temuan untuk setiap kesimpulan inspeksi;
3. Penulisan temuan dalam laporan inspeksi harus spesifik, ringkas dan jelas (dimana dan mengapa), berdasarkan fakta, tidak memasukkan opini, tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian;

4. Laporan Akhir disampaikan kepada Kepala Pusat Karantina Ikan dan dilakukan secara *online* melalui aplikasi CKIB *online* dengan laman: <http://ckib.bkipm.kkp.go.id>.

KOP SURAT
UPT KIPM

Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor : (sesuai nomor permohonan)
Hal : Permohonan Petugas Inspeksi Penerapan CKIB

Kepada Yth
Kepala Pusat Karantina Ikan, BKIPM

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB), Pada PT/CV/Perorangan.....Alamat pada tanggal :..... kami mengusulkan:

No	Nama	Nomor Register	Jabatan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota

untuk melakukan inspeksi dalam rangka (diisi sesuai keperluan) :

- Sertifikasi CKIB baru
- Perpanjangan sertifikasi IKI/CKIB
- Verifikasi tindakan perbaikan
- Inspeksi ulang
- Kondisi tertentu

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nama kota, tanggal/bulan/tahun
Kepala / Pejabat yang ditunjuk

TTD

Nama
NIP.

Formulir 2. Format Surat Perintah Tugas Inspeksi

KOP SURAT

UPT KIPM

Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor: (sesuai nomor permohonan)

Hal : Inspeksi Penerapan CKIB

Dalam rangka menjamin penerapan sistem jaminan kesehatan ikan pada Instalasi Karantina Ikan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor KEP.tentang Pedoman Inspeksi Penerapan CKIB pada Instalasi Ikan Mati, maka kami menugaskan:

No	Nama	Nomor Register	Jabatan	Asal UPT
1	Ketua	
2	Anggota	
3	Anggota	

Untuk melakukan inspeksi (diisi sesuai keperluan):

- Sertifikasi CKIB baru
- Perpanjangan sertifikasi IKI/CKIB
- Verifikasi tindakan perbaikan
- Inspeksi ulang
- Kondisi tertentu

Pada PT/CV.....Alamat pada tanggal :..... Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA satuan kerja..... (UPTKIPM). Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nama kota, tanggal/bulan/tahun
Kepala / Pejabat yang ditunjuk

TTD

Nama
NIP.

Tembusan:

Yth. Pimpinan PT/CV/Perorangan

Formulir 3. Format Daftar Hadir Pembukaan/Penutupan Inspeksi

**KOP
UPT KIPM**

**DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN / PENUTUPAN INSPEKSI CKIB ***

Nama Instalasi :
Alamat :
Tanggal :

No	Nama	Instansi/Jabatan	Tanda tangan

Catatan: * Coret sesuai kegiatan

Formulir 4. Checklist Inspeksi Penerapan CKIB pada Instalasi Ikan Mati Milik Perorangan/Badan Hukum

**CHEKLIST INSPEKSI
PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB)
PADA IKI IKAN MATI MILIK PERORANGAN/BADAN HUKUM**

1	Nama dan Alamat Instalasi Karantina	
2	Nomor Sertifikat IKI/Sertifikat CKIB	
3	Pemilik/ Penanggungjawab (perusahaan/ perorangan/instansi pemerintah)	
4	Komoditas	Segar/beku/kering *)
5	Jenis kegiatan Instalasi	Ekspor/Impor/antar area *)
6	Ukuran ruang Karantina/Kapasitas Daya Tampung	Panjang x Lebar x Tinggi (.....kg/ton)
7	Tanggal Pelaksanaan Inspeksi	
8	Unit/Instansi Pelaksana Inspeksi	
9	Nama dan No. Register Inspektur Karantina	1.....No.reg 2.....No.reg 3.....No.reg
10	Keperluan Inspeksi	<input type="checkbox"/> Sertifikasi CKIB baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan sertifikasi IKI/CKIB <input type="checkbox"/> Verifikasi tindakan perbaikan <input type="checkbox"/> Inspeksi ulang <input type="checkbox"/> Kondisi tertentu

(* Menjadi temuan jika pernyataan di jawab 'tidak')

11 KEPATUHAN TERHADAP PROGRAM CKIB					
PERSYARATAN UTAMA					
No	URAIAN	HASIL INSPEKSI		KATEGORI KRITIS	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Status kepemilikan Instalasi sesuai			<input type="checkbox"/>	
2	Status penggunaan Instalasi sesuai			<input type="checkbox"/>	
3	Akses Personil ke Instalasi terbatas dan terkontrol			<input type="checkbox"/>	
4	Instalasi bebas banjir			<input type="checkbox"/>	
5	Pintu masuk/keluar instalasi terbatas dan terkontrol			<input type="checkbox"/>	
6	Konstruksi dan Bangunan Instalasi sesuai standar sarana dan prasarana instalasi karantina ikan			<input type="checkbox"/>	
7	Lantai Instalasi permanen dan mudah dibersihkan			<input type="checkbox"/>	
8	Tersedia ruang Karantina/ pengasingan sesuai spesifikasi dan peruntukan			<input type="checkbox"/>	

9	Terdapat jarak antara rak/ pallet untuk memudahkan akses melakukan pemeriksaan dan pergerakan/ perpindahan.			<input type="checkbox"/>	
10	Terdapat sarana sanitasi dan Desinfeksi untuk Personel dan Tamu (<i>hand sanitizer, wastafel, sprayer</i>)			<input type="checkbox"/>	
11	Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tahapan kegiatan di instalasi			<input type="checkbox"/>	
12	Tersedia dan lengkap rekaman data kegiatan (<i>logbook</i>)			<input type="checkbox"/>	
13	Tersedia Generator Set (Genset) sesuai kapasitas instalasi.			<input type="checkbox"/>	
14	Tersedia Sarana Pemusnahan media pembawa			<input type="checkbox"/>	

PERSYARATAN MANAJEMEN					KESESUAIAN SAAT INSPEKSI		KET
	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	
A. Pengarsipan							
15. Arsip yang berkaitan dokumen mutu lengkap			<input type="checkbox"/>				
16. Dokumen temuan ketidaksesuaian hasil penilaian/ inspeksi dan tindakan perbaikannya diarsipkan		<input type="checkbox"/>					
17. Dokumen karantina ikan dan dokumen terkait lainnya diarsipkan		<input type="checkbox"/>					
B. Rekaman Data	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	
18. Dilakukan pemutakhiran data disetiap level dari Dokumen Mutu CKIB		<input type="checkbox"/>					
19. Rekaman dokumen mutu terkendali		<input type="checkbox"/>					
20. Pemutakhiran dokumen mutu sesuai perubahan yang terjadi			<input type="checkbox"/>				
21. Pengisian <i>Logbook</i> konsisten dan sesuai fakta			<input type="checkbox"/>				
22. Rekaman data/logbook sesuai dokumen mutu		<input type="checkbox"/>					
C. Audit internal	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	
23. Kaji ulang manajemen dilakukan rutin dan terdokumentasi	<input type="checkbox"/>						
24. Audit internal dilakukan secara rutin dan terdokumentasi	<input type="checkbox"/>						
D. Ketelusuran	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	
25. Ada sistem pengaduan pelanggan dan rekaman data tentang pengaduan pelanggan	<input type="checkbox"/>						
26. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai alur proses produksi				<input type="checkbox"/>			
27. Rekaman data (logbook) diisi secara konsisten dengan data yang akurat.			<input type="checkbox"/>				
28. Memiliki sistem kodefikasi media pembawa yang mampu telusur			<input type="checkbox"/>				

PERSYARATAN TEKNIS					KESESUAIAN SAAT INSPEKSI		KET
A. Kompetensi Personel	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	
29. Penanggungjawab instalasi karantina memiliki pengetahuan yang memadai tentang CKIB			<input type="checkbox"/>				
30. Memiliki personel dengan latar belakang di bidang perikanan/biologi/kimia dan bidang lain yang relevan.		<input type="checkbox"/>					
31. Memiliki perencanaan peningkatan kompetensi personel	<input type="checkbox"/>						
B. Kepatuhan Personel	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	KET
32. Akses masuk dan keluar orang terkontrol			<input type="checkbox"/>				
33. Setiap tamu yang datang mengisi buku tamu	<input type="checkbox"/>						
34. Personel menerapkan prosedur sanitasi di setiap proses kegiatan			<input type="checkbox"/>				
35. Personel mengikuti tata tertib/ketentuan/kebijakan yang terdapat di instalasi karantina		<input type="checkbox"/>					
C. Penerapan Biosecurity	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	KET
36. Instalasi memiliki kebijakan persyaratan terhadap media pembawa yang masuk ke Instalasi			<input type="checkbox"/>				
37. Terdapat jarak antar rak/pallet untuk menghindari kontaminasi silang antar media pembawa			<input type="checkbox"/>				
38. Instalasi memiliki sistem untuk mempertahankan suhu ruang sesuai dengan mutu produk.				<input type="checkbox"/>			
39. Bangunan dan lingkungan instalasi karantina bersih dan terawat			<input type="checkbox"/>				
40. <i>Layout</i> sarana dan prasarana sesuai dengan Dokumen mutu Karantina			<input type="checkbox"/>				
41. Jumlah/ukuran dan jenis media pembawa yang ditampung sesuai dengan kapasitas Instalasi			<input type="checkbox"/>				
42. Pemasukan/ pengeluaran ikan dilakukan sesuai SOP				<input type="checkbox"/>			
43. Terdapat prosedur rencana tanggap darurat yang memadai, jika terjadi wabah			<input type="checkbox"/>				
44. Air buangan/limbah dilakukan perlakuan sebelum dibuang ke perairan umum		<input type="checkbox"/>					
45. Pemusnahan limbah (kemasan, media pembawa yang rusak, dll) dilakukan sesuai dengan SOP dan dilakukan pencatatan				<input type="checkbox"/>			
D. Penerapan Biosafety	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	KET
46. Tanda instruksi tata tertib personel terpasang dengan baik		<input type="checkbox"/>					
47. Mengenakan pakaian kerja dan alat pelindung keselamatan kerja		<input type="checkbox"/>					

48. Pencahayaan di tiap ruangan instalasi karantina mencukupi		<input type="checkbox"/>					
49. Tiap rak/pallet diberi identitas yang jelas		<input type="checkbox"/>					
50. Lantai kesat sehingga aman bagi personel			<input type="checkbox"/>				
E. Pengelolaan Air	MIN	MAJ	SER	KR	YA	TIDAK	
51. Ketersediaan air yang cukup dan sesuai dengan baku mutu air			<input type="checkbox"/>				

12	Hasil Inspeksi		
	No	Kategori	Total Jumlah temuan
	1	Kritis	
	2	Serius	
	3	Mayor	
	4	Minor	
	Klasifikasi		

.....

Inspektur Karantina,

1.

2.

3.

TATA CARA PENGISIAN

CHECKLIST INSPEKSI PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

1. Diisi dengan nama dan alamat lengkap IKI
2. Diisi dengan Nomor sertifikat IKI dan sertifikat CKIB jika ada
3. Diisi dengan nama pemilik/penanggung jawab (perusahaan/perorangan /instansi pemerintah)
4. Diisi dengan jenis komoditas yang sesuai
5. Diisi dengan jenis kegiatan lalu lintas media pembawa
6. Diisi dengan kapasitas daya tampung
7. Diisi tanggal pelaksanaan inspeksi
8. Diisi nama Unit Pelaksana Inspeksi
9. Diisi dengan petugas pelaksana.
10. Diisi dengan tanda (√) pada kotak sesuai jenis inspeksi.
11. Checklist hasil inspeksi kesesuaian diisi dengan tanda (√) sesuai dengan kondisi/fakta di Instalasi dan dapat ditambahkan keterangan pada kolom keterangan untuk menjelaskan temuan (lihat *appendix*);
12. Diisi dengan menjumlahkan jenis temuan sesuai kategori, grade diisi setelah hasil temuan diperbaiki dan telah diverifikasi;
13. Pada akhir halaman checklist diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan inspeksi, nama pelaksana inspeksi dan ditandatangani.
14. Checklist ini merupakan pedoman bagi inspektur karantina ikan dalam menentukan ketidaksesuaian antara dokumen mutu dengan kondisi yang ada yang nantinya didiskusikan dengan pemilik, seterusnya dituangkan dalam form temuan ketidaksesuaian.

Appendix 1. Penjelasan Ceklis Inspeksi Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik pada Instalasi Karantina untuk Ikan Mati

**PENJELASAN CEKLIST INSPEKSI
PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA
INSTALASI KARANTINA UNTUK IKAN MATI**

POIN-POIN CEKLIST	PENJELASAN
Nama dan Alamat Instalasi Karantina	<i>(Sudah jelas)</i>
Nomor Sertifikat IKI/Sertifikat CKIB	<i>(Sudah jelas)</i>
Pemilik/ Penanggung jawab (perusahaan/perorangan/instansi pemerintah)	<i>(Sudah jelas)</i>
Komoditas	(Diisi sesuai jenis komoditas)
Jenis kegiatan Instalasi	<i>(Sudah jelas)</i>
Ukuran ruang Karantina/Kapasitas Daya Tampung	<i>(Sudah jelas)</i>
Tanggal Pelaksanaan Inspeksi	<i>(Sudah jelas)</i>
Unit/Instansi Pelaksana Inspeksi (UPT KIPM/PUSKARI)	<i>(dituliskan nama UPT atau PUSKARI pelaksana kegiatan inspeksi yang melakukan kegiatan tersebut)</i>
Nama dan No. Registrasi Inspektur Karantina	1. 2. 3. <i>(diisi nama-nama personil yang memiliki no registrasi inspektur)</i>
Keperluan Inspeksi	<input type="checkbox"/> Permohonan Sertifikasi CKIB baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan sertifikasi CKIB <input type="checkbox"/> Inspeksi ulang <input type="checkbox"/> Kondisi tertentu <i>(kotak diisi dengan tanda centang (✓) sesuai dalam rangka apa inspeksi dilakukan)</i>

(* Menjadi temuan jika pernyataan di jawab 'tidak')

PERSYARATAN UTAMA	
URAIAN	PENJELASAN
1. Status kepemilikan/penggunaan Instalasi sesuai	Sesuai apabila dapat menunjukkan Surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota yang menjelaskan tentang kepemilikan dan kegiatan usaha di tempat instalasi berada (bukan kantor)
2. Penggunaan Instalasi sesuai komoditas/ peruntukannya	Tidak bercampur dengan produk lain/terpisah/ produk perikanan sesuai ijin (SKT) atau panduan mutu*. * berlaku untuk IKI milik Perorangan dan badan hukum
3. Instalasi bebas banjir	Sudah jelas
4. Akses Personil ke Instalasi terbatas dan terkontrol	Harus ada Tanda "Selain Petugas dilarang masuk"

5. Pintu masuk/keluar instalasi terbatas dan terkontrol	Sudah jelas
6. Konstruksi dan Bangunan Instalasi sesuai pedoman sarana dan prasarana instalasi karantina ikan	Konstruksi dan Bangunan Instalasi permanen dan kokoh
7. Tersedia ruang Karantina/ pengasingan sesuai spesifikasi dan peruntukan	Sudah jelas
8. Terdapat jarak antara rak/pallet untuk memudahkan akses melakukan pemeriksaan dan pergerakan/perpindahan	Sudah jelas
9. Terdapat sarana sanitasi dan Desinfeksi untuk Personel dan Tamu (<i>hands sanitizer, wastafel, sprayer</i>)	Sudah jelas
10. Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tahapan kegiatan di instalasi	Sudah jelas
11. Tersedia dan lengkap rekaman data kegiatan (logbook)	Sudah jelas
12. Tersedia Generator Set (Genset) sesuai kapasitas instalasi	Sudah jelas
13. Tersedia Sarana Pemusnahan media pembawa	Sudah jelas
PERSYARATAN MANAJEMEN	
A. PENGARSIPAN DOKUMEN	PENJELASAN
1. Arsip tentang kaitan dokumen mutu lengkap	Semua dokumen terkait dokumen mutu baik itu panduan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja/SOP, maupun formulir tersedia
2. Dokumen temuan ketidaksesuaian hasil penilaian/ inspeksi dan tindakan perbaikannya diarsipkan	Dokumen/arsip temuan ketidak sesuaian dan perbaikan disimpan/diarsip dengan baik
3. LHU laboratorium di dokumentasikan	LHU diarsip dengan baik
4. Dokumen karantina ikan dan dokumen terkait lainnya diarsipkan	Dokumen terkait karantina dan dokumen pendukung lainnya lengkap dan diarsip
B. REKAMAN DATA	
5. Dilakukan pemutakhiran data disetiap level dari Dokumen Mutu CKIB	Perubahan Dokumen Mutu sesuai dengan Amandement
6. Rekaman dokumen mutu terkendali	Kemudahan akses untuk melihat dan mengecek Dokumen Mutu
7. Pemutakhiran dokumen mutu sesuai perubahan yang terjadi	Kesesuaian perubahan Dokumen mutu dengan prosedur kerja dilapangan
8. Pengisian Logbook konsisten	Pencatatan di logbook sesuai dengan tanggal/ up to date
9. Rekaman data/ logbook sesuai dokumen mutu	Kesesuaian logbook dengan dokumen mutu

C. AUDIT INTERNAL	
10. Kaji ulang manajemen dilakukan rutin dan terdokumentasi	Data/dokumentasi kaji ulang manajemen tersiapkan dengan baik
11. Audit internal dilakukan secara rutin dan terdokumentasi	Data terkait audit internal diarsipkan dengan baik
D. KETELUSURAN	
12. Ada sistim pengaduan pelanggan dan rekaman data tentang pengaduan pelanggan	Sudah jelas
13. Diagram alur proses produksi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan	Kesesuaian diagram alur dengan pelaksanaan kegiatan
14. Rekaman data (logbook) diisi secara konsisten dengan data yang akurat	Sudah jelas
15. Memiliki sistem kodefikasi media pembawa yang mampu telusur	Ketertelusuran asal, jumlah yang masuk dan dikirim, status kesehatan serta tujuan pengiriman
PERSYARATAN TEKNIS	
A. Kompetensi Personel	Penjelasan
16. Penanggungjawab instalasi karantina memiliki pengetahuan yang memadai tentang CKIB	Terdapat sertifikat CKIB, atau dibuktikan dengan surat keterangan telah memiliki pengalaman/keahlian dibidang CKIB
17. Memiliki personil yang memiliki latar belakang di bidang perikanan/ biologi/Kimia dan bidang lain yang relevan	Memiliki arsip Dokumen/Sertifikat personil instalasi karantina
18. Memiliki perencanaan peningkatan kompetensi personil	Melihat perencanaan pihak manajemen instalasi karantina
B. Kepatuhan Personil	
19. Akses masuk dan keluar orang Terkontrol	Terdapat petugas jaga, atau terdapat tanda peringatan
20. Setiap tamu yang datang mengisi buku tamu	Terdapat buku tamu dan terdapat petugas jaga/ security
21. Personil menerapkan prosedur sanitasi disetiap proses kegiatan	Mengamati proses kerja di instalasi karantina (saat melakukan kegiatan sanitasi disetiap bagian/ruangan instalasi karantina)
22. Personil mengikuti tata tertib/ Ketentuan/ Kebijakan yang terdapat di instalasi karantina	Mengamati personil Instalasi karantina dalam melaksanakan aktifitas kerja di instalasi karantina (Pakaian kerja, sanitasi dan proses kerja di instalasi karantina)
C. Penerapan Biosecurity	
23. Instalasi memiliki kebijakan persyaratan terhadap media pembawa yang masuk ke Instalasi	Kebijakan persyaratan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Bebas penyakit, • Ketertelusuran, • Keamanan hasil perikanan (dibuktikan dengan LHU atau HC)
24. Terdapat jarak antar rak/pallet untuk menghindari kontaminasi silang antar media pembawa	Sudah jelas
25. Instalasi memiliki sistem untuk mempertahankan suhu ruang sesuai dengan mutu produk	Sudah jelas

26. Bangunan dan lingkungan instalasi karantina bersih dan terawatt	Sudah jelas
27. Layout sarana dan prasarana sesuai dengan Dokumen mutu Karantina	Melihat kesesuaian layout dalam dokumen mutu dengan layout di lapangan
28. Jumlah/ukuran dan jenis media pembawa yang ditampung sesuai dengan kapasitas Instalasi	Sudah jelas
29. Pemasukan/ pengeluaran ikan dilakukan sesuai SOP	Sudah jelas
30. Terdapat prosedur rencana tanggap darurat yang memadai, jika terjadi wabah	Sudah jelas
31. Air buangan/limbah dilakukan perlakuan sebelum dibuang ke perairan umum	Dilakukan oleh perusahaan maupun pihak ketiga.
32. Pemusnahan limbah (kemasan, media pembawa yang rusak, dll) dilakukan sesuai dengan SOP dan dilakukan pencatatan	Melihat catatan pemusnahan limbah
D. Penerapan Biosafety	
33. Tanda instruksi tata tertib personil terpasang dengan baik	Sudah jelas
34. Mengenakan pakaian kerja dan alat pelindung keselamatan kerja	Pakaian kerja dan alat yang hanya dipakai ketika melakukan kegiatan di Instalasi
35. Pencahayaan di tiap ruangan instalasi karantina mencukupi	Sudah jelas
36. Tiap ruang diberi identitas yang jelas	Sudah jelas
E. Pengelolaan Air	
37. Ketersediaan air yang cukup dan sesuai dengan baku mutu air	Sudah jelas

**KOP
UPT KIPM**

DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Nama Instalasi : Alamat : No. Telp : No. Fax :	No. Sert.IKI : No. Sert.CKIB : Tanggal Inspeksi :
Jenis Media Pembawa :	Temuan :
Pimpinan Instalasi : Pelaksana Inspeksi 1. Ketua : 2. Anggota : :	

Temuan Ketidaksesuaian	Keterangan
Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal:	
Ketua Tim Inspeksi (.....)	Pimpinan Instalasi (.....)

**LAPORAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
INSPEKSI PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK
(CKIB)
DI**

Pelaksana Tugas :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan : Inspektur Karantina Ikan
 No. Registrasi :

 2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan : Inspektur Karantina Ikan
 No. Registrasi :

 3. Dst.
- Tanggal Inspeksi :
 Nomor Surat Tugas :
 Sumber Dana :
 Tujuan Inspeksi :
 Penerapan CKIB di PT/CV :
 Alamat IKI :

I. PELAKSANAAN KEGIATAN

1.
2. dst

No	Dokumentasi *	
1	Sarana Pengamatan/Pengasingan	Sarana Pemusnahan
2	Sarana Pengolahan Limbah	Sarana lainnya

*dokumentasi berupa foto

II. HASIL YANG DIPEROLEH

- 1.
.....
- 2. dst

No	Dokumentasi Temuan ketidaksesuaian *	
1	Foto	Keterangan
2	Foto	Keterangan
3	dsb	

*dokumentasi berupa foto

Demikian laporan pelaksanaan inspeksi CKIB dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/Tahun
Ketua Tim Inspeksi CKIB,

.....
NIP.

KOP PERUSAHAAN

Tanggal, Bulan, Tahun

Yth. Kepala UPT KIPM
di
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya inspeksi penerapan CKIB di perusahaan kami pada tanggaldan adanya temuan ketidaksesuaian yang harus kami perbaiki, bersama ini disampaikan bahwa kami telah lakukan perbaikan atas temuan tim pelaksana inspeksi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan,

Nama jelas _____
Jabatan

Formulir 8. Format Laporan Tindakan Perbaikan Temuan Inspeksi

LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN TEMUAN INSPEKSI

Nama Instalasi :

Alamat :

Tanggal Inspeksi :

Inspektur Karantina Ikan : 1.

2.

3.

No	Temuan dan Tindakan Perbaikan Fisik	
1.	Temuan :	
	Tindakan Perbaikan :	
	Lampiran :	
	Tanggal Penyelesaian :	
	Gambar Sebelum Perbaikan	Gambar Setelah Perbaikan
2.	Temuan :	
	Tindakan Perbaikan :	
	Lampiran :	
	Tanggal Penyelesaian :	
	Gambar Sebelum Perbaikan	Gambar Setelah Perbaikan
3.	Dan seterusnya	

Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan IKI,

.....

**TATA CARA PENGISIAN
FORMAT LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN IKI**

1. Manajemen IKI mengisi nama perusahaan/pemilik, alamat IKI, tanggal inspeksi dan nama inspektur karantina ikan sesuai dengan surat tugas.
2. Temuan : Diisi dengan hasil temuan mengacu kepada daftar temuan ketidaksesuaian.
3. Tindakan perbaikan : Diisi dengan pernyataan IKI terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.
4. Lampiran : Diisi dengan nama dokumen/data yang dapat mendukung gambar tindakan perbaikan atau blanko tindakan perbaikan dari temuan yang bersifat administratif.
5. Tanggal penyelesaian perbaikan : Diisi dengan tanggal pada saat perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang telah diperbaiki oleh manajemen IKI.
6. Gb. Sebelum Perbaikan : Diisi foto dari temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi.
7. GB. Sesudah Perbaikan : Diisi foto dari hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh manajemen IKI.
8. Tanggal, Bulan, Tahun : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun manajemen IKI membuat laporan.

KETENTUAN:

1. Setiap tindakan perbaikan temuan inspeksi yang bersifat fisik harus disertai dengan foto sebelum perbaikan dan setelah perbaikan.
2. Setiap tindakan perbaikan temuan inspeksi yang bersifat administratif harus disertakan dengan dokumen/data/rekaman yang dijadikan temuan ketidaksesuaian dan setelah dilakukan perbaikan.
3. Manajemen IKI melaporkan hasil perbaikan dari temuan ketidaksesuaian kepada Kepala UPT KIPM setempat.
4. Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur KI yang melaksanakan inspeksi di IKI tersebut, untuk menverifikasi hasil tindakan perbaikan.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI UPT – KIPM**

Pada hari ini, *Tanggal, Bulan, Tahun*, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa telah dilakukan verifikasi yang terkait hasil perbaikan berdasarkan kegiatan inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina:

Nama Instalasi Karantina :
Alamat :
Tanggal Inspeksi :
Inspektur Karantina Ikan :

Verifikasi Perbaikan

Tanggal :
Inspektur Karantina Ikan :

Berikut hasil verifikasi terhadap perbaikan temuan Inspeksi:

No	Temuan/	Hasil Perbaikan	Tgl Selesai Perbaikan	Hasil Verifikasi (sesuai/tidak sesuai/lainnya*)
1				
2				
3				
dst				

* diisi target waktu penyelesaian apabila masih dalam masa proses perbaikan

Demikian Berita Acara Verifikasi terhadap perbaikan temuan Inspeksi atas nama PT/CV, dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tgl/bln/tahun
Inspektur Karantina Ikan
UPT KIPM.....

Nama
NIP.....

KOP UPT KIPM

Tgl, Bln, Tahun

Yth. Kepala Pusat Karantina Ikan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor:

Sehubungan dengan telah dilakukannya verifikasi tindakan perbaikan ke Unit Usaha Pembudidaya Ikan, maka bersama ini disampaikan sebagai berikut:

No	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan hasil verifikasi tindakan perbaikan CV/PT.	2 (dua) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

Kepala UPT KIPM

.....

KOP BADAN KIPM

Nomor: Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran :
Hal : Perpanjangan Masa Perbaikan Temuan Inspeksi.

Yth. Pimpinan PT/CV/
di

Sehubungan laporan pelaksanaan verifikasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian yang dilakukan pada tanggal, yang menyatakan bahwa dalam masa waktu perbaikan temuan yang disepakati sampai dengan tanggal tidak dapat dipenuhi dan dengan ini kami memberikan perpanjangan waktu kepada saudara untuk memperbaiki temuan dimaksud sampai dengan tanggal

Perlu kami sampaikan bahwa saudara diharuskan untuk segera melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dalam masa waktu perpanjangan di atas. Apabila saudara tidak melakukan perbaikan, maka dengan berat hati kami sampaikan bahwa perusahaan saudara tidak akan mendapatkan Sertifikat CKIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim CKIB,

Nama jelas
NIP.

BAB VI PENUTUP

Inspeksi penerapan CKIB di instalasi karantina untuk ikan mati pada kegiatan importasi komoditas perikanan merupakan salah satu tahapan dalam penjaminan kesehatan ikan di instalasi karantina sebagai salah satu cara mitigasi risiko penularan hama dan penyakit ikan karantina. Melalui kegiatan inspeksi dapat diketahui konsistensi dan kesungguhan manajemen/pihak instalasi dalam menjalankan program CKIB, sehingga suatu *warning* diperlukan apabila terindikasi adanya penyakit atau program CKIB tidak berjalan sebagaimana mestinya agar dapat dilakukan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan secara dini.

Selain itu pada kegiatan importasi komoditas perikanan khususnya untuk ikan mati, kegiatan inspeksi juga dapat dilakukan untuk memastikan seluruh komoditas perikanan selama masa karantina masih tetap berada di instalasi karantina dan belum dipindahkembangkan dari instalasi ke tempat lain atau dipindahtanggankan kepada pihak lain dan/atau ditukar dengan komoditas perikanan dari jenis yang sama/lainnya.

Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan pelaksanaan kegiatan inspeksi penerapan CKIB pada instalasi karantina untuk ikan mati pada importasi komoditas perikanan oleh Inspektur Karantina di lingkup Pusat atau UPT KIPM dapat lebih terukur dan terarah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Kerja Sama, dan Humas,

